



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan bandar udara yang belum diusahakan secara komersil, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1600);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
- b. Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);
- c. Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);

- d. Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 976);
- e. Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1600);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Jumlah Unit Penyelenggara Bandar Udara sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
 - b. 12 (dua belas) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
 - c. 23 (dua puluh tiga) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II; dan
 - d. 121 (seratus dua puluh satu) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.
 - (2) Satuan Pelayanan Bandar Udara berjumlah 32 (tiga puluh dua) Bandar Udara.
 - (3) Daftar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan satuan pelayanan Bandar Udara yang memuat nama bandara, lokasi, dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan daftar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan satuan Pelayanan Bandar Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara diubah sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 602 NOMOR 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

E. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40
TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA

DAFTAR KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Propinsi Daerah Istimewa Aceh				
1.	Cut Nyak Dhien	Nagan Raya	II	
2.	Maimun Saleh	Sabang	III	
3.	Lasikin	Sinabang	III	
4.	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	III	
	Syekh Hamzah Fanshuri	Aceh Singkil	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali
5.	Rembele	Takengon	III	
	Blangkajeren	Gayo Lues	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Rembele
	Alas Leuser	Kutacane	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Rembele
6.	Malikussaleh	Aceh Utara	III	
Prop. Sumatera Utara				
7.	Binaka	Gunungsitoli	II	
8.	Lasondre	Pulau-pulau Batu	III	
9.	Dr. Ferdinand Lumbantobing	Tapanuli Tengah	III	
	Sibisa	Toba	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumbantobing
10.	Aek Godang	Padang Sidempuan	III	
	Jenderal Besar Abdul Haris Nasution	Mandailing Natal	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Aek Godang
Prop. Sumatera Barat				
11.	Mentawai	Kepulauan Mentawai	III	Sebelumnya Bandar Udara Rokot Sipora (Perubahan nama bandar udara berdasarkan KM 23

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Kepulauan Riau				
12.	Dabo	Singkep	III	
	Tambelan	Bintan	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Dabo
13.	Letung	Kepulauan Anambas	III	
14.	Raja Haji Abdullah	Karimun	III	
15.	Ranai	Natuna	III	
Prop. Riau				
16.	Japura	Rengat	III	
17.	Tuanku Tambusai	Rokan Hulu	III	Sebelumnya bandar udara Pasir Pangaraian (Perubahan nama bandar udara berdasarkan KM 43 Tahun 2021)
Prop. Jambi				
18.	Depati Parbo	Kerinci	III	
19.	Muara Bungo	Bungo	III	
Prop. Bengkulu				
20.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	I	
21.	Muko-muko	Muko-muko	III	
	Enggano	P. Enggano	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Muko-muko
Prop. Sumatra Selatan				
22.	Silampari	Lubuk Linggau	III	
	Muhammad Taufiq Kiemas	Pesisir Barat, Lampung	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Silampari
	Atung Bungsu	Pagar Alam	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Silampari
	Gatot Subroto	Way Kanan, Lampung	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Silampari
Prop. Bangka Belitung				
23.	H. As. Hanandjoedin	Tanjung Pandan	I	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Lampung				
24.	Radin Inten II	Lampung Selatan	I	
Prop. Jawa Barat				
25.	Cakrabhuwana	Cirebon	III	
	Wiriadinata	Tasikmalaya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Cakrabhuwana
Prop. Jawa Tengah				
26.	Tunggul Wulung	Cilacap	III	
27.	Dewa Daru	Karimunjawa	III	
	Ngloram	Blora	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Dewa Daru
Prop. Jawa Timur				
28.	Trunojoyo	Sumenep	III	
29.	Harun Thohir	Gresik	III	
Prop. Nusa Tenggara Barat				
30.	Sultan Muhammad Salahuddin	Bima	II	
31.	Sultan Muhammad Kaharuddin	Sumbawa	III	
Prop. Nusa Tenggara Timur				
32.	Fransiskus Xaverius Seda	Maumere	II	
33.	Umbu Mehang Kunda	Waingapu	II	
34.	Komodo	Labuan Bajo	II	
35.	H. Hasan Aroeboesman	Ende	II	
36.	Frans Sales Lega	Ruteng	III	
37.	Lede Kalumbang	Sumba Barat Daya	II	Sebelumnya UPBU Tambolaka (Perubahan nama bandar udara berdasarkan KM 206 Tahun 2022)
38.	A.A. Bere Tallo	Atambua	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
39.	Mali	Alor	III	
	Kabir	Alor	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Mali
40.	Gewayantana	Larantuka	III	
41.	David Constantijn Saudale	Rote Ndao	III	
42.	Tardamu	Sabu	III	
43.	Soa	Bajawa	III	
44.	Wunopito	Lewoleba	III	
Prop. Kalimantan Barat				
45.	Rahadi Oesman	Ketapang	II	
46.	Tebelian	Sintang	II	
	Singkawang	Singkawang	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas II Tebelian
47.	Pangsuma	Putussibau	II	
48.	Nangapinoh	Nangapinoh	III	
Prop. Kalimantan Tengah				
49.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	I	
50.	Iskandar	Pangkalan Bun	II	
51.	H. Asan	Sampit	II	
52.	Sunggu	Buntok	III	
53.	Haji Muhammad Sidik	Barito Utara	III	Relokasi Bandar Udara Beringin
	Tira Tangka Balang	Murung Raya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Haji Muhammad Sidik
54.	Kuala Pembuang	Seruyan	III	
55.	Tumbang Samba	Katingan	III	
56.	Kuala Kurun	Gunung Mas	III	
Prop. Kalimantan Selatan				
57.	Gusti Sjamsir Alam	Kotabaru	II	
Prop. Kalimantan Timur				
58.	Aji Pangeran Tumenggung Pranoto	Samarinda	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
59.	Melak	Sendawar	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
60.	Kalimarau	Tanjung Redep	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
61.	Maratua	Berau	III	
62.	Datah Dawai	Mahakam Ulu	III	
Prop. Kalimantan Utara				
63.	Juwata	Tarakan	I Utama	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
64.	Kol. Robert Atty Bessing	Malinau	III	
65.	Nunukan	Nunukan	III	
66.	Yuvai Semaring	Long Bawan	III	
67.	Tanjung Harapan	Tanjung Selor	III	
68.	Long Apung	Long Apung	III	
Prop. Sulawesi Utara				
69.	Naha	Tahuna	III	
	Sitaro	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Naha
	Bolaang Mongondow	Bolaang Mongondow	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Naha
70.	Melonguane	Kepulauan Talaud	III	
	Miangas	Kepulauan Talaud	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Melonguane
Prop. Gorontalo				
71.	Djalaluddin	Gorontalo	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Prop. Sulawesi Tengah				
72.	Mutiara Sis Al Jufri	Palu	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
73.	Pogogul	Buol	III	
	Panua Pohuwato	Pohuwato	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Pogogul

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
74.	Syukur Aminuddin Amir	Luwuk	II	
	Banggai Laut	Banggai Laut	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir
75.	Tanjung Api	Tojo Una-Una	III	
76.	Sultan Bantilan	Toli-toli	III	
77.	Kasiguncu	Poso	II	
78.	Morowali	Morowali	III	
Prop. Sulawesi Barat				
79.	Tampa Padang	Mamuju	II	
	Sumarorong	Mamasa	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas II Tampa Padang
Prop. Sulawesi Selatan				
80.	Toraja	Tana Toraja	III	Relokasi Bandar Udara Pongtiku
81.	H. Aroepala	Pulau Selayar	III	
82.	Andi Jemma	Luwu Utara	III	
83.	Arung Palakka	Bone	III	
84.	Seko	Seko	III	
85.	Rampi	Rampi	III	
86.	Lagaligo	Luwu	III	
Prop. Sulawesi Tenggara				
87.	Haluoleo	Konawe Selatan	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
88.	Matahora	Wakatobi	III	
89.	Sangia Nibandera	Kolaka	III	
90.	Betoambari	Bau Bau	III	
91.	Sugimanuru	Muna Barat	III	
Prop. Maluku Utara				
92.	Sultan Babullah	Ternate	II	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
93.	Emalamo	Sanana	III	
94.	Buli	Maba	III	
	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Buli

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
				(Sebelumnya Pelayanan Kantor UPBU Kelas II Sultan Babullah)
95.	Kuabang	Kao	III	
96.	Gamar Malamo	Galela	III	
97.	Oesman Sadik	Halmahera Selatan	III	
98.	Pitu	Morotai	III	
Prop. Maluku				
99.	Karel Sadsuitubun	Kab. Maluku Tenggara	II	
100.	John Becker	Pulau Kisar – Kab. Maluku Barat Daya	III	
	Jos Orno Imsula	Maluku Barat Daya	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III John Becker
101.	Larat	Kab. Kepulauan Tanimbar	III	
102.	Dobo	Pulau Aru – Kepulauan Aru	III	
103.	Mathilda Batlayeri	Kab. Kepulauan Tanimbar	III	
104.	Bandaneira	Pulau Banda – Maluku Tengah	III	
	Kufar	Seram Bagian Timur	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Bandaneira
105.	Namniwel	Pulau Buru	III	
106.	Namrole	Buru Selatan	III	
107.	Amahai	Maluku Tengah	III	
108.	Wahai	Maluku Tengah	III	
Prop. Papua Barat Daya				
109.	Domine Eduard Osok	Kota Sorong	I	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
110.	Marinda	Kab. Raja Ampat	III	
111.	Inanwatan	Kab. Sorong Selatan	III	
112.	Teminabuan	Kab. Sorong Selatan	III	
	Segun	Kab. Sorong	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Teminabuan
113.	Kambuaya	Kab. Maybrat	III	
114.	Kebar	Kab. Tambrau	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
	Werur	Kab. Tambrauw	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Kebar (Sebelumnya Pelayanan Kantor UPBU Kelas I Domine Eduard Osok)
115.	Ayawasi	Kab. Sorong Selatan	III	
Prop. Papua Barat				
116.	Rendani	Manokwari	II	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
117.	Siboru	Kab. Fakfak	III	Relokasi Bandar Udara Torea
118.	Bintuni	Kab. Teluk Bintuni	III	
	Anggi	Pegunungan Arfak	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Bintuni
119.	Utarom	Kab. Kaimana	III	
120.	Merdey	Teluk Bintuni	III	
121.	Wasior	Teluk Wondama	III	
122.	Babo	Kab. Teluk Bintuni	III	
Prop. Papua Tengah				
123.	Douw Aturure	Kab. Nabire	II	Relokasi Bandar Udara Nabire
124.	Bilorai	Kab. Intan Jaya	III	
125.	Enarotali	Kab. Paniai	III	
126.	Waghete	Kab. Deiyai	III	
127.	Mulia	Kab. Puncak Jaya	III	
128.	Moanamani	Kab. Dogiyai	III	
129.	Kokonau	Kab. Mimika	III	
130.	Akimuga	Kab. Mimika	III	
131.	Mozes Kilangin	Kab. Mimika	II	Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
132.	Ilaga	Kab. Puncak	III	
	Sinak	Kab. Puncak	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Ilaga
133.	Illu	Kab. Puncak Jaya	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
Prop. Papua				
134.	Sentani	Jayapura	I Utama	
135.	Dabra	Kab. Mamberamo Raya	III	
136.	Senggeh	Kab. Keerom	III	
137.	Mararena	Kab. Sarmi	III	
138.	Stevanus Rumbewas	Kab. Kepulauan Yapen	III	
139.	Numfor	Kab. Biak Numfor	III	
Prop. Papua Pegunungan				
140.	Wamena	Kab. Jayawijaya	I	
141.	Elelim	Kab. Yalimo	III	
142.	Oksibil	Kab. Pegunungan Bintang	III	
143.	Kiwirok	Kab. Pegunungan Bintang	III	
144.	Bokondini	Kab. Tolikara	III	
145.	Tiom	Kab. Lanny Jaya	III	
146.	Batom	Kab. Pegunungan Bintang	III	
147.	Karubaga	Kab. Tolikara	III	
148.	Nop Goliat Dekai	Kab. Yahukimo	II	
	Sobaham	Kab. Yahukimo	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat Dekai
Prop. Papua Selatan				
149.	Mopah	Kab. Merauke	I	
	Senggo	Kab. Mappi	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas I Mopah
150.	Kamur	Kab. Asmat	III	
151.	Kimam	Kab. Merauke	III	
152.	Bomakia	Kab. Boven Digoel	III	
153.	Tanah Merah	Kab. Boven Digoel	III	
	Manggalum	Kab. Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah
	Koroway Batu	Kab. Boven Digoel	Satpel BU	Pelayanan Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah
154.	Mindiptana	Kab. Boven Digoel	III	
155.	Kepi	Kab. Mappi	III	
156.	Okaba	Kab. Merauke	III	

NO	NAMA BANDARA	LOKASI	KELAS	KETERANGAN
157.	Ewer	Kab. Asmat	III	
158.	Bade	Kab. Mappi	III	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO